

## ABSTRAK

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa menggunakan Dana Desa yang berasal dari alokasi APBN. Pengelolaan APB Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan terdapat lima tahap dalam pengelolaan APB Desa, antara lain: 1) Perencanaan APB Desa, 2) Pelaksanaan APB Desa, 3) Penatausahaan APB Desa, 4) Pelaporan APB Desa, 5) Pertanggungjawaban APB Desa. Besarnya dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dapat membuka kesempatan tindak kecurangan bagi pihak yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis antara lain: reduksi data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wedoro secara umum belum cukup baik dikarenakan terdapat beberapa kegiatan dalam tahap-tahap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tidak sesuai dengan peraturan dan adanya praktik-praktik yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Pembangunan Desa

## **ABSTRACT**

The management of the Village Development Budget (APB Desa) is mostly allocated for the village infrastructure development utilizes Village Funds, originating from the APBN allocation. The management of the Village Development Budget (APB Desa) is conducted in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 Year 2018 concerning Village Financial Management which states that there are five stages in the management of APB Desa, namely: 1) Planning, 2) Implementation, 3) Administration, 4) Reporting, and 5) Accountability. The large amount of funds used for infrastructure development becomes a chance for the authorities to commit fraud. This study aims to determine the accountability of the management of the Village Development Budget (APB Desa) for infrastructure development. This study used a qualitative approach with analytical techniques, including: data reduction, data triangulation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the management of the Village Development Budget (APB Desa) for the infrastructure development at Wedoro Village is not good enough generally due to the fact that there are several activities in the stages of Village Development Budget (APB Desa) management which are not in accordance with the regulation, as well as the existence of inappropriate practices conducted by the village government.

**Keywords:** Accountability, Management of Village Development Budget (APB Desa), Village Development